

## Kutuk Pemerksa 12 Santriwati, DPR: Dikenakan Pasal Berlapis

JAKARTA (IM) - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka mengutuk keras perbuatan seorang guru pesantren bernama Herry yang memperksa 12 santriwati di Bandung, Jawa Barat. Ia berharap agar pelaku dihukum pidana seberat-beratnya dengan pasal berlapis.

"Hukumnya keraslah, sesuai yang berlaku, tapi hukumnya juga jangan ringan begitu, harus tinggi," kata Diah kepada wartawan, Jumat (10/12).

"Kalau bisa, bisa pasal perlindungan anak, bisa pasal KUHP kan. Kalau bisa pasal berlapis," katanya berharap.

Menurutnya proses hukum terhadap Herry Wirawan harus dikemukakan ke publik sebagai transparansi. Di sisi lain, perlindungan terhadap para santriwati yang menjadi korban kekejaman Herry tetap harus dijaga oleh aparat yang berwenang.

"Enggak bisa dalam peradilan, korban jangan dibiarkan sendirian, harus ada yang dampingkan menjaga. Ya kan kalau enggak nanti hukumnya enggak maksimal. Itu satu, proses peradilan harus terpantau," katanya.

Diah meminta Kementerian Agama (Kemenag) membuat satu peraturan mengenai pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah agama. Sebab, dia menilai kekerasan seksual dapat mengancam siapa saja di lingkungan sekolah agama, baik siswa maupun siswi.

Dia pun berkecapi pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan

Teknologi (Permendikbud-Ristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi yang dinilai sudah tepat.

Namun, dari situ dibutuhkan aturan pula untuk pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah lainnya, salah satunya ruang pendidikan agama.

"Kalau Permendikbud kan di sekolah umum kan, kalau ini, sekolah agama juga kalau perlu dibikin peraturannya, di lingkungan anak-anak siswa baik laki-laki atau perempuan terhadap ancaman kekerasan seksual," ucap Diah.

Diah mendorong Kemenag untuk menyiapkan layanan pengaduan yang proaktif untuk menerima segala aduan dari para korban kekerasan seksual.

"Makanya harus dibikin layanan pengaduan, kalau bisa proaktif juga lakukan pengawasan. Harus mulai adalah materi-materi pemahaman kekerasan seksual di luar sekolah, sekolah agama. Karena orang cenderung susah bicara, takutlah apalagi sama guru-guru agama, kan orang siswa pada takut," kata Diah.

Seorang guru pesantren MH di Bandung, Jawa Barat yaitu Herry Wirawan (36) diduga melakukan tindakan pemerkosaan pada 12 santriwati. Akibat perbuatannya, delapan korban yang di bawah umur sudah melahirkan. Sementara dua orang sedang hamil. ● han

## Ketua KPK Firlil Bahuri Ngaku Heran Ada Koruptor Ditangkap Bilangnya Apes

JAKARTA (IM) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firlil Bahuri merasa heran dengan koruptor ketika ditangkap mengatakan sedang apes. Padahal, mereka menimbulkan kerugian negara yang besar.

"Kerugian negara yang kita selamatkan sudah cukup besar, upaya pencegahan pun kita lakukan, tetapi belum mampu membersihkan Indonesia dari korupsi. Saya banyak bertanya, bahkan ada para koruptor yang kita tangkap, ada yang mengatakan nasib sial, apes, nah ini yang tidak boleh terjadi," ujar Firlil melalui akun YouTube milik KPK RI, Jumat (10/12).

Menurut Firlil, budaya antikorupsi merupakan hal mendasar yang perlu dibangun dan dikembangkan. Firlil berkecapi dari upaya-upaya sebelumnya mulai dari pendidikan hingga pencegahan yang belum mampu membersihkan Indonesia dari korupsi. Oleh karenanya, ke depan Firlil ingin ada fokus untuk pembangunan budaya antikorupsi melalui pendidikan.

"Kenapa kita bersemangat ingin untuk melakukan pembangunan budaya antikorupsi karena dari yang kita lihat secara empiris, begitu banyak yang sudah ditangkap, baik KPK sekarang sudah 1.291, tahun 2021 aja kita sudah tahan orang sampai saat ini sudah 109. saya

yakin bulan 12 tahun 2021 ini akan bertambah," ujarnya.

Dari data yang diketahui Firlil, setidaknya sudah ada 353 kepala daerah yang menyusun peraturan untuk memasukkan materi ajaran antikorupsi dalam pendidikan. Kata Firlil, KPK akan terus mendorong agar semua daerah juga membuat peraturan untuk memasukkan materi antikorupsi dalam pendidikan.

"Sasarannya apa? materi ajaran SD, SMP, SMA, SLTA, pendidikan formal maupun non formal, itu yang kira sasar," imbuhnya.

Tak hanya itu, KPK juga sedang fokus membangun penyuluh antikorupsi. KPK telah bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, kalangan cendekiawan, hingga universitas untuk mencetak penyuluh antikorupsi. Sejuah ini, sudah ada ribuan agen antikorupsi yang dicetak KPK.

"Kalau penyuluh antikorupsi itu sudah 2.014 orang sampai hari ini, tentu kita perbanyak, kalau ahli pembangunan integritas sekarang 228 tentu kita akan perbanyak. Sehingga semakin banyak penyuluh antikorupsi, semakin banyak ahli pembangunan integritas, maka kami berkeyakinan budaya antikorupsi akan masif dan merupakan peradaban bangsa Indonesia," tuturnya.

● mei

## Relawan Tak Persoalkan Ganjar Jadi Capres Tidak Melalui PDI-P

JAKARTA (IM) - Relawan yang tergabung dalam Siap Ganjar Presiden (Sigap) tidak mempersoalkan jika Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo maju sebagai calon presiden pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 tidak melalui PDI-P.

Ketua Umum Sigap, Suherman mengatakan, pihaknya akan terus mendukung Ganjar untuk menjadi presiden, apa pun partai pengusungnya.

"Kami relawan Sigap, saya sudah menyatakan mulai dari titik nol Provinsi DKI sampai ke Papua, Ganjar arah ke mana pun tetap relawan Sigap mendorong," kata Suherman, dalam acara pelantikan pengurus Sigap DKI Jakarta, di kawasan Menteng, Jakarta, Jumat (10/12).

Suherman mengaku belum menjalin komunikasi dengan partai-partai politik terkait pencalonan Ganjar sebagai presiden.

Ia pun menilai, Ganjar masih memiliki peluang untuk diusung PDI-P sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

"Saya melihat secara politik PDI-P belum memberi sinyal pada Ganjar, tapi itu

poin-poin normatif, nanti saya liat lagi konstelasinya di 2022," katanya.

Ia juga meyakini bahwa Ganjar memiliki peluang untuk merebut suara di DKI Jakarta yang merupakan "kandang" Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, salah satu tokoh dengan elektabilitas tinggi.

"Itu maupun kata Anies di kandang DKI, ini adalah milik rakyat. Baik provinsi DKI, Banten, tetap milik rakyat Indonesia," kata Suherman.

Sebelumnya, Sigap telah mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar untuk maju sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Suherman menilai Ganjar sosok yang tepat untuk memimpin Indonesia setelah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berakhir pada 2024.

"Menurut relawan Sigap, yang terhormat Bapak Ganjar Pranowo adalah sosok yang tepat meneruskan kepemimpinan di masa datang, sehingga Indonesia lebih berwibawa dan bermartabat di mata dunia," kata Suherman, saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (5/11) lalu. ● mei

# 2 Polhukam

FOTO/ANT



## MENSOS KUNJUNGI KORBAN BANJIR BANDANG DI LOMBOK

Menteri Sosial Tri Rismaharini (tengah) bersama Anggota DPR Rachmat Hidayat (kiri) dan Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah (ketiga kanan) mengunjungi anak-anak korban banjir bandang di Dusun Batulayar Utara, Desa Batulayar Barat, Kecamatan Batulayar, Lombok Barat, NTB, Jumat (10/12). Dalam kunjungannya Mensos menyempatkan menyapa dan menghibur anak-anak korban banjir di pengungsian di Batulayar serta meninjau lokasi banjir lainnya di daerah Kekait Gunungsari.

# Presiden Jokowi: Pemerintah Berkomitmen Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Jokowi mengatakan, memahami jika saat ini Komnas HAM mengangkat tema HAM, Toleransi, Resiliensi pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia 2021.

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah berkomitmen menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat.

"Pemerintah berkomitmen untuk menegakkan, menuntaskan dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan bagi korban dan keadilan bagi yang diduga menjadi pelaku HAM berat," ujar Jokowi pada Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia Tahun 2021 di Istana Negara, Jumat (10/12).

Kata Jokowi, pasca UU 26/2000 tentang pengadilan HAM, pemerintah melalui jaksas agung telah mengambil

langkah untuk melakukan penyidikan umum terhadap peristiwa pelanggaran HAM Berat.

"Salah satu kasus adalah tadi yang sudah disampaikan oleh bapak ketua Komnas HAM, adalah kasus Paniai di Papua tahun 2014. Berangkat dari berkas hasil penyidikan dari komnas HAM, kejaksaan tetap melakukan penyidikan umum untuk menjamin terwujudnya prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum," ungkapnya.

Kepala Negara mengungkapkan bahwa jaminan hak-hak sipil, politik dan hukum harus menjadi perhatian bersama. Semua warga negara

memiliki hak dan kedudukan yang setara dalam politik dan hukum.

"Semua warga negara berhak mendapat perlindungan yang sama dari negara tanpa membeda-bedakan suku agama gender atau pun ras. Semua warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang setara dalam mendapatkan pelayanan dari negara. Dan berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak," tandasnya.

Jokowi memahami jika Komnas HAM mengangkat tema HAM, Toleransi, Resiliensi pada peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia 2021. Mengingat, saat tengah pandemi Covid-19.

"Ini menggambarkan situasi yang tepat untuk saat ini. Kegelisahan yang dirasakan oleh Komnas HAM adalah juga yang dirasakan pemerintah dan juga yang dirasakan oleh masyarakat," katanya.

Menurut Jokowi, bangsa ini telah berjuang keras selama

dua tahun di masa pandemi ini. Salah satunya berjuang dalam pemenuhan HAM.

"Selama dua tahun kita telah berjuang untuk memenuhi hak asasi manusia Indonesia dalam menghadapi krisis kesehatan dan krisis perekonomian akibat pandemi Covid-19," ungkapnya.

Jokowi mengungkapkan bahwa pemerintah telah berusaha keras agar masyarakat memperoleh rasa aman dari ancaman pandemi.

"Kita juga berusaha, agar

masyarakat memperoleh rasa aman dari ancaman kelaparan dan ancaman pengangguran," ujarnya.

Menurutnya, walaupun ancaman pandemi masih membayangi dunia, tetapi perjuangan bangsa Indonesia tidak sia-sia.

"Indonesia termasuk 1 dari 5 negara di dunia yang berhasil menekan pandemi Covid-19 ke level terendah, ke level 1. Dan juga alhamdulillah berhasil menjaga stabilitas ekonomi nasional kita," katanya. ● mar

FOTO: ANT



## PEMERIKSAAN INDRAWIJAYA SUPRIADI DAN EKO MASDIANTO

Tersangka mantan Direktur Pelaksana UKM dan Asuransi Penjaminan LPEI 2016-2018 Indrawijaya Supriadi (kiri) dan mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Makasar (LPEI) 2019-2020 Eko Masdiyanto (kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (10/12). Kedua tersangka diperiksa penyidik Kejaksaan Agung atas perkara dugaan korupsi dalam penyelenggaraan pembiayaan ekspor nasional oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tahun 2013-2019.

## Ajukan Judicial Review UU Pemilu, Dua Anggota DPD Minta PT 0 Persen

JAKARTA (IM) - Dua anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Fachrul Razi dan Bustami Zainudin, mengajukan uji materi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi (MK), Jumat (10/12).

Dalam permohonannya, mereka meminta agar MK menetapkan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) 0 persen.

"Kita doakan kepada Allah SWT semoga tergugah hati Hakim MK memperhatikan dan memutuskan seadil-adilnya dalam rangka yang terbaik terhadap demokrasi Indonesia dan kita harapkan nol persen jawaban terhadap masa depan Indonesia," kata Fachrul Razi dalam siaran pers, Jumat (10/12).

Senator asal Aceh itu pun mengajak seluruh pihak untuk mengampanyekan pentingnya mengubah presidential threshold 0 persen. Sementara itu Bustami mengatakan, dengan ambang batas pencalonan 0 persen, maka setiap warga negara memiliki peluang untuk maju sebagai calon presiden.

"Kita berharap UU ini menjadi pintu bagi segenap warga bangsa terutama para pemimpin di daerah yang potensial untuk bisa juga berkip-

rah ditingkat nasional punya kesempatan yang sama untuk mereka bisa mencalonkan menjadi pemimpin nasional," ujar senator asal Lampung tersebut.

Bustami berharap, ketentuan ambang batas pencalonan 0 persen nantinya juga dapat diterapkan dalam pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota.

"Kalau 20 persen ini bisa kita nol-kan, mau tidak mau, suka tidak suka untuk memilih pimpinan daerah baik bupati, gubernur, wali kota kita juga berharap akan menjadi rujukan yang sama yaitu dengan nol persen ini," katanya.

Adapun Pasal 222 UU Pemilu saat ini mengatur ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen jumlah kursi DPR atau 25 persen suara sah pada Pemilu sebelumnya. ● han

### PENGUMUMAN

Guna memenuhi ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berkaitan dengan perubahan PT GANIMA PRIMA MINERALS (dalam Likuidasi) diumumkan berdasarkan Neraca untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 tercatat total Kewajiban, Modal dan Ekuitas sebesar Rp. 90.000.000,- akan menjadi bagian para pemegang saham untuk bagian yang sama besarnya.

Kabupaten Bogor, 11 Desember 2021  
Likuidator PT GANIMA PRIMA MINERALS (dalam Likuidasi)



## INDONESIA PERINGKAT 5 DUNIA VAKSINASI COVID-19 DOSIS PENUH

Tenaga kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada warga di Jakarta, Kamis (9/12). Indonesia menempati peringkat lima dalam daftar negara-negara sedunia dengan jumlah orang terbanyak yang sudah disuntik vaksin COVID-19 dosis penuh, menurut Our World in Data hingga Selasa (7/12/2021).